

BANYAK JABATAN STRATEGIS KOSONG

Terkendala Durasi Pelantikan, Tantangan Jalankan Program

YOGYA (KR) - Kepemimpinan Walikota Yogya Hasto Wardoyo dan Wakil Walikota Yogya Wawan Harmawan di fase awal kali ini dihadapkan dengan banyaknya jabatan strategis yang mengalami kekosongan. Prosesi pelantikan pun terkendala seiring regulasi, sehingga menjadi tantangan dalam menjalankan program kerja.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mengaku komisinya menaruh perhatian serius perihal sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung kinerja eksekutif. Hal itu lantaran menjadi salah satu ketugasan Komisi A terkait penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam Undang-undang Pilkada mengamatkan bahwa kepala daerah atau walikota baru bisa melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan enam bulan setelah dirinya dilantik sebagai kepala daerah. Kecuali mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini tentu menjadi perhatian khusus mengingat beberapa jabatan strategis di pemerintahan

Kota Yogya banyak yang kosong," paparnya, Minggu (9/3).

Sejumlah pejabat yang kosong antara lain Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD (Setwan), Staf Ahli Bidang Adminstrasi Pembangunan, Kepala Bagian Kerja Sama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta sejumlah Mantri Pamong Praja (MPP) atau camat. Tidak hanya pejabat teras saja, sejumlah jabatan struktural di bawahnya juga banyak mengalami kekosongan.

Dwi Candra berharap, kepala daerah sudah mulai melakukan pemetaan pos-pos jabatan yang

kosong tersebut di seluruh jajaran Pemkot Yogya. Pemetaan setidaknya sudah dirampungkan dalam waktu cepat. Dengan begitu sebelum sampai batas ketentuan atau enam bulan setelah Hasto-Wawan dilantik sebagai kepala daerah, sudah ada pejabat berkompeten yang dikantongi. "Sehingga bisa segera dilakukan akselarasi sebagai wujud pelayanan masyarakat yang prima dan implementasi visi misi Hasto-Wawan yang terangkum dalam Hasta Jogja Mulia dengan pengisian pejabat yang kompeten," imbuhnya.

Hasto-Wawan dilantik sebagai walikota dan wakil walikota terhitung sejak 20 Februari 2025 lalu. Oleh karena itu merujuk pada UU Pilkada, yang bersangkutan baru bisa melantik pejabat teras pada akhir Agustus 2025 mendatang. Meski demikian Hasto-Wawan juga memiliki opsi lain untuk mengajukan izin ke Mendagri agar bisa melakukan rotasi atau pelantikan pejabat lebih awal. Tentunya, seluruh

proses tersebut harus didahului dengan mekanisme pengisian pejabat yang mengedepankan manajemen talenta.

Menurut Dwi Candra, kekosongan jabatan merupakan sisi yang penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat pengambilan keputusan terkadang menjadi kendala dalam akselerasi program. Apalagi Kepala BKPSDM dan Kepala DLH karena konsentrasi utama visi misi atau program kerja Hasto-Wawan adalah peningkatan SDM baik masyarakat maupun ASN di pemerintahan, juga penanganan masalah sampah.

"Dalam beberapa kesempatan Pak Hasto sering menyampaikan jika Yogya tidak memiliki sumber daya alam sehingga SDM lah yang harus dioptimalkan. Makanya BKPSDM memiliki peran penting. Begitu pula terkait percepatan penanganan sampah yang membutuhkan kiprah sentral dari DLH. Akan tetapi kedua organisasi ini jabatannya masih kosong dan hanya diisi oleh pelak-

sana teknis (Plt)," urainya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2026 mendatang juga akan ada sejumlah pejabat teras setara eselon II yang akan pensiun. Salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya yang bakal purna per tanggal 1 Januari 2026. Hal itu pun harus bisa menjadi perhatian agar kelak jangan sampai banyak diisi oleh Plt. Sedini mungkin proses regenerasi turut disiapkan agar setiap yang purna bisa langsung mendapatkan pengganti.

"Jangan sampai nanti banyak diisi oleh Plt, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa diputuskan segera mengingat Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Apabila sudah disiapkan jabatan yang kosong dengan Plt dapat dihindari dan akselarasi program visi misi walikota dapat segera terwujud," tandasnya. **(Dhi)-f**

PKK BERPERAN PENTING BERIKAN EDUKASI

Bebas Stunting Perlu Sinergi Antar Organisasi



KR-Istimewa

GKR Hemas pada pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda serta Pengukuhan Ibu PAUD se-DIY.

YOGYA (KR) - Keberadaan PKK memiliki peran besar dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, serta pemanfaatan pangan lokal yang sehat dan bergizi. Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah adanya stunting yang sampai saat ini masih terjadi disekumlah daerah. Selain PKK, Posyandu dan Ibu PAUD juga dituntut proaktif dalam upaya pencegahan stunting.

"Adanya Posyandu dan Ibu PAUD diharapkan dapat berperan dalam mencegah dan menanggulangi stunting sejak dini. Karena tim penggerak PKK, Posyandu, Dekranasda dan Ibu Paud memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dibidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun penguatan ketahanan keluarga," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Jumat (7/3).

Dalam kesempatan Paku Alam X bersama GKR Hemas dan GKBRAA Paku Alam menyerahkan piagam dan plakat kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-DIY masa bakti 2023-2024. Penyerahan piagam dan plakat tersebut merupakan bagian dari acara Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda serta Pengukuhan Ibu PAUD Kabupaten/Kota se-DIY.

Wagub DIY mengatakan, deteksi dini dan intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan oleh Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Begitu juga dengan Ibu PAUD, selain bertanggung jawab memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan usia dini yang berkualitas, Ibu PAUD juga perlu menerapkan pola makan sehat di lingkungan pendidikan anak usia dini. Adapun Dekranasda, diharapkan bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

"Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar organisasi serta stakeholders terkait lainnya, diharapkan DIY bebas stunting bisa segera diwujudkan," ungkapnya.

Sementara itu Ketua PKK DIY, GKR Hemas usai membacakan ikrar dan penandatanganan naskah pelantikan, menyampaikan, tim penggerak PKK memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Inovasi dalam setiap program yang telah berjalan, terus ditingkatkan agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat.

"Dengan adanya kerja sama yang baik, sinergi antar organisasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Saya optimis PKK DIY dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Saya berharap, PKK DIY bisa menjadi ujung tombak dalam mendukung program-program pemerintah baik pusat maupun daerah," imbuh GKR Hemas. **(Ria)-f**

BERIKAN KEAMANAN BAGI PEMUDIK

10 Maret, Dishub Lakukan Uji Kelaikan Bus

YOGYA (KR) - Keamanan dan kenyamanan para pemudik saat menggunakan angkutan umum dalam momentum libur Idul Fitri harus selalu menjadi prioritas. Guna mewujudkan hal itu Dinas Perhubungan (Dishub) DIY akan mengadakan uji kelaikan atau ramp check untuk bus secara serentak mulai 10 Maret 2025. Rencananya pemeriksaan itu akan dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari terminal hingga garasi bus. Ramp check dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan angkutan umum memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional.

"Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan semua bus yang beroperasi saat arus mudik dalam kondisi laik jalan. Karena keamanan dan kenyamanan penumpang harus menjadi prioritas utama. Saya minta supaya semuanya bisa dilaksanakan secara optimal perusahaan otobus (PO) tidak bersikap pasif dalam memastikan kelaikan kendaraan yang mereka operasikan," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DIY, Sumariyoto

di Yogyakarta, Sabtu (8/3).

Sumariyoto mengatakan, selain lewat ramp check seperti yang dilakukan oleh Dishub DIY, para pemudik juga bisa melakukan pengecekan kelaikan bus secara mandiri melalui aplikasi Mitra Darat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Adapun untuk caranya cukup mudah, karena mereka cukup memasukkan nomor kendaraan, nanti bisa mengetahui apakah bus yang hendak digunakan telah lulus uji kelaikan atau tidak. Guna memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan itu Dishub DIY akan memberikan stiker berwarna berbeda pada setiap bus sesuai dengan hasil ramp check. Stiker hijau menandakan bahwa bus telah lolos uji dan layak beroperasi.

"Kalau bus mendapatkan stiker kuning berarti masih perlu perbaikan sebelum dapat digunakan untuk mengangkut penumpang. Sedangkan untuk stiker merah diberikan kepada kendaraan yang dinyatakan tidak layak jalan dan dilarang beroperasi selama masa angkutan Lebaran," terangnya. **(Ria)-f**

PICU MASALAH SOSIAL, JADI FENOMENA GUNUNG ES

Sigit Wicaksono Desak Hasto Bubarkan KMS

YOGYA (KR) - Program Kartu Menuju Sehat (KMS) yang telah bergulir sejak puluhan tahun di Kota Yogya dinilai sudah tidak representatif lagi. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono pun mendesak Walikota Yogya Hasto Wardoyo untuk membubarkan program tersebut.

Sigit Wicaksono menegaskan dari aspek manfaat justru KMS lebih banyak madharat atau dampak buruknya. Terutama berbagai masalah sosial yang dipicu dari program tersebut. "Ini sudah menjadi gunung es di wilayah. Terutama bagi aparat RT dan RW. Banyak dari mereka yang tidak lagi bertegur sapa hanya gara-gara KMS. Kalau perangkat wilayah saja bisa musuhan apalagi masyarakatnya," urainya, Minggu (9/3).

KMS yang setiap tahun selalu memicu masalah sosial tersebut berawal dari proses pendataan maupun validasi calon penerima. Hal ini karena peran RT dan RW cukup vital dalam memberikan rekomendasi atau penilaian. Di tingkat bawah bahkan sudah saling sepakat untuk gantian. Hal ini

karena tidak sedikit warga yang seharusnya dapat KMS namun justru tidak masuk penerima. Sebaliknya, warga yang dari strata sosialnya mampu justru mengantongi KMS. Sehingga jika tahun ini jatuh si A maka tahun depan menjadi kesempatan bagi si B.

Akibatnya, imbuh Sigit Wicaksono, hal tersebut justru menjadi gaduh di masyarakat. Selamanya akan terus begitu dan sewaktu-waktu jika tidak ada pendekatan yang baik, akan meledak menjadi persoalan serius. "Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) harus membuka mata persoalan tahunan ini. Jangan hanya bersembunyi di balik meja. Sehingga ini menjadi momentum bagi walikota baru untuk membubarkan KMS karena madharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya," paparnya.

Sigit Wicaksono menambahkan, berbagai bantuan sosial saat ini sudah mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk di dalamnya ialah kepastian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu otomatis manfaat KMS semakin

berkurang. Peruntukan KMS saat ini lebih pada mendapatkan kuota sekolah negeri, santunan kematian maupun tunggakan biaya pendidikan. Sedangkan biang kerok warga berebut KMS ialah untuk mendapatkan kuota masuk sekolah negeri. Hal ini yang memicu terjadinya masalah sosial hingga membuat aparat di tingkat RT dan RW saling bermusuhan.

Sebagai solusi atas pembubaran KMS, imbuhnya, ialah dengan membuat regulasi yang jelas dan tegas. Misalnya santunan kematian sudah tidak diperlukan lagi manakala Pemkot berani menyediakan layanan pemakaman secara gratis untuk seluruh warga. Begitu pula tunggakan biaya pendidikan, bisa diakses oleh siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari Dinsosnakertrans. Sedangkan kuota sekolah negeri bisa mengacu pada DTKS. "Ini momentum bagi walikota baru. Sekaligus juga saatnya jajaran ASN bekerja secara optimal. Dulu selama kota ini dijabat oleh penjabat (Pj) banyak ASN yang hanya mencari aman. Saya yakin, dari program unggulan walikota sudah mampu menggantikan peran KMS," tegasnya. **(Dhi)-f**

KETUA KOMISI A SUSANTO DWI ANTORO

Tegakkan Aturan, Sat Pol PP Jangan 'Bermain' Politik



KOTA YOGYAKARTA

ah politik, terutama untuk urusan tebang pilih objek yang diterbitkan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menegaskan penegakan aturan menjadi salah satu ketugasan di alat kelengkapan yang dipimpinnya. Sejak awal tahun pihaknya sudah mencoba memetakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran perda. "Semangat yang dibangun adalah bagaimana semua bisa menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Apalagi jika telah dituangkan dalam perda maupun perwal sebagai juknisnya. Kami sudah mulai melakukan pemetaan. Terutama dari yang terlihat dulu seperti pendirian reklame, hotel hingga vandalisme," urainya, Minggu (9/3).

Terhadap temuan pelanggaran maka harus ada upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga aparat terutama Sat Pol PP yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawal dan penegak perda, tidak boleh tebang pilih atau bahkan bermain politik.

Sayangnya, imbuh Toro sapaan akrabnya, siasat tebang pilih hingga terkesan bermain politik justru terlihat oleh Sat Pol PP Kota Yogya.

Dirinya mencontohkan aksi vandalisme yang masih cukup banyak ditemui namun tindakan penertiban terkesan lemah. Lain halnya ketika saat itu muncul aspirasi di berbagai daerah termasuk Kota Yogya, berupa tulisan 'Adili Jokowi' di ruang publik. Tidak sampai hitungan hari, tulisan tersebut langsung lenyap ditertibkan Sat Pol PP. Sementara vandalisme lain yang lebih dulu mengotori ruang publik justru tak kunjung ditertibkan. "Ini satu bukti ada dugaan ikut bermain politik. Kenapa musti takut, atau memang ada tekanan. Kalau tulisan 'Adili Jokowi' saja bisa ditertibkan dengan kilat, maka pelanggaran lainnya seharusnya juga bisa dong," tegasnya.

Upaya tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Seperti halnya penertiban para pedagang kuliner atau kopi di kawasan Kotabaru. Di mana Sat Pol PP Kota Yogya baru bertindak ketika sudah memunculkan keramaian. Hal seperti itu, terang Toro, seharusnya sudah bisa dideteksi sejak awal.

"Mestinya kan sudah bisa dideteksi. Bukannya hampir setiap hari ada yang patroli melakukan pemantauan? Kalau sudah menimbulkan kegaduhan, lantas siapa yang dirugikan? Akhirnya masyarakat juga kan," tanyanya.

Begitu juga masalah reklame maupun pendirian hotel. Jajarannya sudah meminta bidang-bidang terkait di jajaran eksekutif untuk mengumpulkan bukti. Terutama kesesuaian antara perizinan dengan teknis di lapangan maupun yang tidak mengantongi izin. Siapapun pemilik atau pengelolanya, sepanjang menabrak aturan yang ada maka wajib untuk segera ditertibkan. "Kita jaga betul, jangan sampai ada pembiaran karena itu akan merusak iklim investasi di kota ini," terangnya. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan